

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PEGAWAI

Nurul Arifah

Unviersitas Muhammadiyah Sukabumi

Email : nurul.arifah@gmail.com

ABSTRAC

Received :
03-31-2021

Received in Revised
Format :
03-31-2021

Accepted :
03-31-2021

Available Online :
03-31-2021

This study aims to determine the effect of Accountability and Transparency of the Budget Management Employee Organizational Commitment in SMAN 4 Sukabumi. Variabel used in this study is the Accountability and Transparency of the Budget Management Employee Organizational Commitment. The study population was all employees SMAN 4 Sukabumi, amounting to 98 people, with a total sample of 47 people. Results research shows that the accountability and transparency of budget management have a positive effect on organizational commitment of employees.

Key word: Accountability, Transparency and Budget Management, Employee Organizational Commitment

PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran. Pasca reformasi terdapat paradigma baru dalam manajemen anggaran daerah. Paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran, dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Maka dari itu sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola anggaran secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu terhadap anggaran yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dari sisi manajemen keuangan, salah satunya mengenai dana BOS. Pada tahun 2013, dialokasikan dana BOS SMA sebesar Rp. 2,118 triliun untuk 4,23 juta siswa SMA. Bantuan disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung ke sekolah. Pelaksanaan program BOS SMA mengikuti pedoman yang disusun oleh Pemerintah. MBS menuntut pengelola sekolah mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan anggaran secara baik yang tidak terlepas dari prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan pengendalian anggaran sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat

penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Aturan mengenai pelaporan keuangan sekolah, menegaskan keharusan transparansi pengelolaan anggaran sekolah serta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pendidikan baik kepada pemerintah (akuntabilitas vertikal) maupun kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal).

Penyusunan dan pelaporan anggaran sekolah banyak menimbulkan persoalan. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dipandang tidak transparan dan didominasi oleh kepentingan kepala sekolah. Komite sekolah lebih sering sebagai formalitas, dan tidak menjalankan perannya yang seharusnya sebagai wakil publik dalam pengambilan keputusan mengenai RAPBS yang berkaitan dengan pelaporan atas penggunaan anggaran sekolah.

Transparansi pengelolaan anggaran pendidikan berarti terbukanya akses bagi seluruh *stakeholder* terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen pengelolaan pembiayaan sekolah. Dengan transparansi tersebut akan berdampak pada kepercayaan *stakeholder* terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya akuntabilitas dan transparansi kepala sekolah dalam pengelolaan anggaran adalah makin melemahnya ikatan emosional pegawai terhadap sekolah sebagai induk organisasinya. Indikasi ini nampak dari makin pudarnya etos kerja, sikap apatisme terhadap sekolah, dan berbagai bentuk penyelewengan etika profesi sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak profesional. Dalam hal pegawai melakukan penyelewengan etika profesi, maka dapat dikatakan bahwa pegawai

tersebut tidak memiliki integritas pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai komitmen terhadap sekolah mengalami kelemahan. Pegawai sekolah sebagai tenaga kependidikan mulai tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan sekolah sebagai induk organisasi tempatnya melaksanakan pengabdian. Sikap loyalitas terhadap organisasi dan kesediaan untuk mengupayakan yang terbaik bagi kepentingan organisasi belumlah optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntabilitas

menurut Suhardan, Riduwan, Enas (2012:56) bahwa akuntabilitas merupakan usaha untuk memberi perlindungan dan tindakan sewenang-wenang, perlindungan terhadap yang lemah, berupa kontrol sosial. Terutama perlindungan terhadap pengguna jasa, terhadap konsumen. Apakah pendidikan yang ditempuhnya bermanfaat atau tidak bagi diriya dikemudian hari. Dengan adanya akuntabilitas, maka penyelenggaraan pendidikan tidak akan sembarangan menyelenggarakan pendidikan, sebab diawasi dan dikontrol masyarakat melalui kontrol sosial.

Suhardan, Riduwan, Enas (2012:57) Sekiranya akuntabilitas pendidikan mendapat perhatian dan dapat dilaksanakan di Indonesia secara jujur, mungkin *unemployment educated population* akan dapat ditekan seminimalnya, sebab penyelenggara pendidikan harus bertanggung jawab kepada semua pihak terutama kepada murid yang menjadi lulusannya.

Tingkat keberhasilan akuntabilitas

Keberhasilan akuntabilitas pembiayaan pendidikan dapat diukur juga dengan memerhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan.

- 2) Peningkatan peran serta dan partisipasi aktif publik dalam turut serta membangun sekolah.
- 3) Berkurangnya intensitas kesalahan dan ketidak efektif serta keefisienan penggunaan pendanaan pendidikan di sekolah.

Dengan tercapainya indikator keberhasilan akuntabilitas pembiayaan pendidikan berarti cita-cita mewujudkan generasi yang berkualitas dan kompetitif dapat dengan mudah dicapai.

Transparansi pengelolaan anggaran

Transparansi berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal anggaran. Begitupula menurut Rachmat (2011 :30) Transparansi adalah tindakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pendidikan, istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan, apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah. Ini berarti bahwa sekolah harus memberikan informasi yang benar kepada publik

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Sumarsono (2010:54) mendefinisikan transparansi pengelolaan anggaran sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang masalah anggaran. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:18), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.

Andrianto (2007:21) menyatakan bahwa transparansi anggaran menjadi

penting karena memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
- 6) Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Berdasarkan pada konsep dan prinsip transparansi anggaran diatas, dapatlah disimpulkan beberapa kriteria transparansi anggaran digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran.
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
- 3) Keterbukaan proses.
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Komitmen organisasi pegawai

Sikap kerja berisi evaluatif positif dan negatif yang dimiliki oleh pegawai tentang aspek-aspek lingkungan kerja mereka. Salah satu sikapnya adalah komitmen pegawai terhadap organisasi. Beberapa ahli perilaku organisasi telah banyak memberikan definisi tentang komitmen organisasi pegawai. Diantaranya Colquitt, LePine, dan Wesson (2009) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keinginan seorang pegawai untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi.

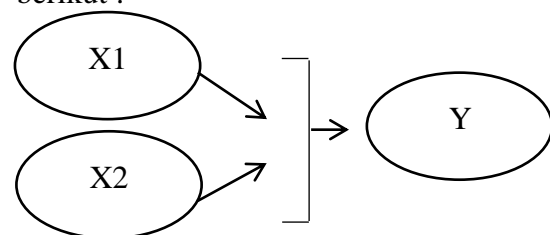
Komitmen pegawai terhadap organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Stum (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan 5 (lima) faktor yang berpengaruh terhadap komitmen

organisasional, yaitu: (1) budaya keterbukaan, (2) kepuasan kerja, (3) kesempatan personal untuk berkembang, (4) arah organisasi, dan (5) penghargaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

Hipotesis

- 1) H₁ : Diduga terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Komitmen Organisasi Pegawai pada SMA Negeri 4 Kota Sukabumi.
- 2) H₂ : Diduga terdapat pengaruh Transparansi Pengelolaan Anggaran terhadap Komitmen Organisasi Pegawai pada SMA Negeri 4 Kota Sukabumi.
- 3) H₃ : Diduga terdapat pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran terhadap Komitmen Organisasi SMA Negeri 4 Kota Sukabumi.

Maka penulis menggunakannya sebagai panduan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma penelitian adalah ini sebagai berikut :



Gambar 1.
Paradigma penelitian

Objek Penelitian dan Variabel Penelitian

Objek penelitian ini adalah Di SMAN 4 Kota Sukabumi. Variabel penelitian adalah Akuntabilitas (X1), transparansi pengelolaan anggaran (X2) dan komitmen organisasi pegawai (Y).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, Desain penelitian digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif Asosiatif.

POPULASI DAN SAMPEL

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai SMAN 4 Sukabumi yang berjumlah 98 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*.

Berkaitan dengan penentuan besarnya sampel (*sample size*), Arikunto (2010:178) menyatakan bahwa agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik maka diperlukan sampel yang betul-betul mencerminkan populasi, sehingga penentuan jumlah sampel dengan persentase kini sudah harus ditinggalkan. Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin sebagai berikut (Umar, 2004:78)

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

dimana:

n = Jumlah anggota sampel yang diambil

N = Jumlah anggota populasi

e = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

sehingga:

$$n = \frac{98}{(98)(0.1)^2 + 1} = \frac{98}{0,98 + 1} = 49,4 \approx 49$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, maka besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 49 orang. Namun demikian, dari 49 instrumen yang disebar hanya 47 instrumen yang kembali, sehingga banyaknya data yang diolah sebanyak 47 responden.

Instrumen pengukuran

Kuesioner digunakan sebagai instrument penelitian ini. Kuesioner dikembangkan menggunakan tipe tertutup, dengan pilihan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Dikembangkan pertanyaan untuk variabel akuntabilitas, 17 pertanyaan untuk variabel transparansi pengelolaan anggaran 20 dan 32 pertanyaan untuk variabel komitmen

organisasi pegawai. Dalam penelitian ini, untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen maka uji coba dilakukan pada pegawai SMA Negeri 5 Sukabumi yang berjumlah 20 orang. Kuesioner yang sudah valid dan reliabel didistribusikan kepada responden.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahar, guru. Jawaban dari responden dikodekan menggunakan skala Likert. Dua variabel pertama, yaitu akuntabilitas dan transparansi merupakan variabel bebas, dan variabel partisipasi merupakan variabel terikat.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik yang sering digunakan adalah teknik pengumpulan data yang meliputi :

- 1) Data primer diperoleh dengan cara, dalam lingkungan berbeda lapangan atau lab dan sumber yang berbeda.terdiri dari observasi, wawancara dan kuesioner.
- 2) Data sekunder yang berguna untuk memperoleh sebanyak mungkin dasar-dasar teori yang diharapkan untuk menunjang pengolahan data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif dengan perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu *microsoft excel* dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical and Service Solution*). Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini meliputi nama responden, jenis kelamin, jabatan dalam SMAN 4 Kota Sukabumi, dan lama masa kerja dari responden yang bersangkutan.

Hasil dan pembahasan

Karakteristik obyek penelitian

Pegawai SMAN 4 Sukabumi tidak banyak memiliki permasalahan dengan sumber daya manusianya untuk menopang pencapaian tujuan organisasi sekolah. Apalagi dari guru SMAN 4 Sukabumi sebanyak 52,04 % (atau 51 orang guru) telah tersertifikasi dan artinya mereka telah menikmati tunjangan profesi dan berlatarbelakang pendidikan yang variatif, dari jenjang SD sampai Strata-2. Tiga peringkat tertinggi yaitu pegawai yang berlatarbelakang pendidikan S-1 menempati persentase yang tertinggi yaitu sebesar 65,30% disusul Strata-2 sebesar 20,40%, dan SMA sebesar 11,22% dan sisanya berlatar belakang diploma, SMP dan SD. Dengan komposisi tersebut, SMAN 4 Sukabumi telah didukung oleh pegawai yang sangat potensial.

Karakteristik responden

Dari 47 orang responden, sebagian besar responden adalah guru (33 orang atau 70,21277 %) yang terdiri dari 13 orang guru laki-laki dan 20 orang guru perempuan dan 14 orang responden (atau 29,78723%) adalah 4 orang laki-laki non guru dan 10 orang perempuan non guru. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Sebagian besar berpendidikan DIV/S1 (21 orang atau 44,68085 %) yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 15 orang perempuan dan bahkan terdapat 16 orang pegawai yang berpendidikan S-2 (atau 34,04255 %) yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 13 orang perempuan

Dari 47 orang responden, sebagian besar berstatus PNS (36 orang atau 76,59574 %) yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 24 orang perempuan bahwa dari 25 orang responden yang berstatus PNS atau 53,19149% yang mempunyai kepangkatan golongan IV (empat) dan berada dalam usia produktif.

Uji validitas dan Reliabilitas

Uji validitas

Berdasarkan yang diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun

masing-masing kuesioner memiliki t_{hitung} lebih besar dari t_{table} ($t_{hitung} > 0,444$). Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi. Setelah diuji yang dinyatakan tidak valid adalah item X1 karena dengan $t_{hitung} 0,112 > t_{tabel} 0,444$.

Uji Validitas untuk Transparansi Pengelolaan Anggaran (variabel X2), hanya item 5, 19 dan 21 Saja dinyatakan tidak valid karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau lebih kecil dari 0,444.

Untuk Komitmen Organisasi Pegawai (variabel Y), dari 32 item pertanyaan hanya 4 item yaitu 21, 24, 28 dan 30 Saja dinyatakan tidak valid karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau lebih kecil dari 0,444. Dan sisa itemnya dinyatakan Valid karena $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Nilai *Cronbach's Alpha* pada Akuntabilitas (variabel X) sebesar 0,833. Karena nilai lebih dari 0,444 ($0,833 > 0,444$) maka dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel Akuntabilitas adalah reliabel.

Untuk Transparansi Pengelolaan Anggaran Nilai *Cronbach's Alpha* (variabel X2) $0,876 > 0,444$ maka dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel Transparansi Pengelolaan Anggaran adalah reliabel. Diketahui pula nilai *Cronbach's Alpha* pada Komitmen Organisasi Pegawai (variabel Y) Sebesar 0,896. Karena nilai lebih dari 0,444 ($0,896 > 0,444$) maka dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel Komitmen Organisasi Pegawai adalah reliabel.

Analaisis Deskriptif Variabel Penelitian

Menggunakan rumus, Riduwan

$$(2004:71) : DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

DP = Deskriptif Persentase (%)

n = Skor empirik (Skor yang diperoleh)

N = Skor Ideal untuk setiap item

pertanyaan

Tabel 1
Ringkasan hasil nilai Deskriptif Presenstasi (DP)

VA R	SKO R RES P	SKO R IDEA L	DP (%)	KRITER IA
X1	3.19 8	3.760	85,05 %	Tinggi
X2	3.60 9	4.320	83,54 %	Tinggi
Y	5.64 3	6.580	85,75 %	Tinggi

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Untuk akuntabilitas ,transparansi pengelolaan anggaran dan komitmen organisasi pegawai memiliki kenormalan data $> 0,05$, dimana akuntabilitas (X1) $0,200 > 0,005$, transparansi pengelolaan anggaran (X2) $0,200 > 0,05$ dan komitmen organisasi pegawai (Y) $0,200 > 0,05$.

Dari hasil pengolahan data tersebut, terlihat besarnya nilai *statistic Kolmogorov- Smirnov (K-S)* variabel Akuntabilitas (X1) yaitu sebesar 0,634 dan signifikansi pada 0,816. suatu model regresi dikatakan mempunyai distribusi data normal apabila nilai akuntabilitasnya $> 0,05$, demikian dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* $< 1,97$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas terdistribusi secara normal karena $p = 0,816 > 0,05$, dan nilai Z $0,634 < 1,97$.

Variabel Transparansi Pengelolaan Anggaran (X2) yaitu sebesar 0,728 dan signifikansi pada 0,664. Dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan anggaran terdistribusi secara normal karena $p = 0,664 > 0,05$, dan nilai Z $0,728 < 1,97$. Variabel komitmen organisasi pegawai (Y) yaitu sebesar 0,584 dan signifikansi pada 0,885. Dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi pegawai terdistribusi secara normal karena $p = 0,885 > 0,05$, dan nilai Z $0,584 < 1,97$.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi

data terdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

Uji Multikoleniaritas

Hasil perhitungan nilai *tollerance* dimana hasil *tollerance* 0,649 nilai *tolerance* lebih dari 0,10. yang berarti terdapat korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang berbeda, tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. VIF $1,541 < 10$.Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan tes *Durbin-Watson* menunjukkan nilai 1,986.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai hasil tes *Durbin-Watson* berada pada $-2 < 1,986 < 2$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi diantara *error term* pada taraf kesalahan 5%.

Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplot dinyatakan titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Regresi Linear Berganda

Dapat diketahui bahwa persamaan regresi berganda penelitian pada SMAN 4 Sukabumi adalah sebagai berikut :

$$Y = 36,946 + (0,842X_1) + (0,336X_2)$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa *koefisien intercept* dari persamaan di atas adalah sebesar 36,946 yang mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran (X1, X2) tetap, maka tingkat perolehan komitmen organisasi pegawai (Y) adalah

sebesar 36,946. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui bahwa jika akuntabilitas (X1) naik maka komitmen organisasi pegawai akan naik sebesar 0,842. Sama halnya dengan transparansi pengelolaan anggaran (X2), jika transparansi pengelolaan anggaran naik maka komitmen organisasi pegawai akan naik menjadi 0,336.

Uji Hipotesis

Uji T (Secara Parsial)

Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,974 > 2,015$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak, maka secara parsial Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Komitmen Organisasi Pegawai.

Juga secara parsial menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,498 > 2,015$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak, maka secara parsial Transparansi Pengelolaan Anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Komitmen Organisasi Pegawai pada SMA Negeri 4 Kota Sukabumi.

Uji F (Secara Simultan)

Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($45,950 > 3,209$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak, artinya secara simultan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi Pegawai.

Uji R^2 (Koefisien determinasi)

Nilai R^2 (Adjusted R Square) untuk SMAN 4 Sukabumi adalah 0,662, artinya Sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu hanya 66,2% sedangkan sisanya sebesar 33,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Perhitungan koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = Koefisiendeterminasi

r = Koefisienkorelasi

Sehingga diketahui koefisien determinasinya sebagai berikut:

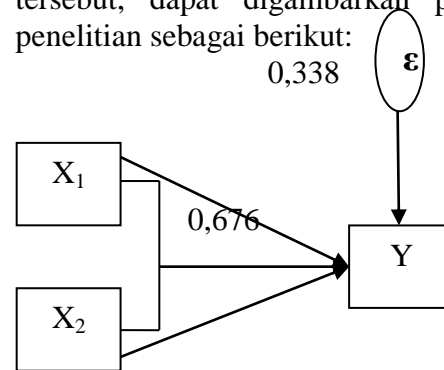
$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,822)^2$$

$$Kd = 0,676 \times 100\%$$

$$Kd = 67,6 \%$$

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai Kd = 67,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap komitmen organisasi pegawai termasuk kedalam kriteria kuat. Maka hasil perhitungan tersebut, dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2
Paradigma Hasil Penelitian

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh yang kuat secara langsung antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran terhadap komitmen organisasi pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, kedua dan ketiga diterima.

Begitupula secara simultan kedua variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil data deskriptif presentase untuk perhitungan yang sama masing-masing dari masing-masing variabel setelah ditabulasikan semua variable masuk dalam kriteria tinggi. Adapun beberapa keterbatasan–keterbatasan tersebut antara lain :

Penelitian ini hanya mengambil tiga buah variable namun masih banyak yang mempengaruhi komitmen organisasi pegawai, misalnya partisipasi orang tua,

budaya organisasi dan sebagainya. Tempat penelitian yang digunakan terbatas karena hanya meneliti di satu sekolah. Disamping itu peneliti mempunyai keterbatasan dalam mengoperasikan program SPSS 21, sehingga harus mengulang beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang valid.

Saran

Pengelola anggaran di SMA Negeri 4 Sukabumi lebih menyediakan layanan untuk secara terbuka memberikan kesempatan kepada *stakeholder* dalam akses informasi yang terkait anggaran secara tepat waktu, sistematis, dan akurat. Transparansi anggaran selayaknya difahami sebagai sebuah proses dimana sekolah menyediakan, membuka akses, dan atau menyebarkan informasi terkait anggaran baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun pada saat pertanggungjawabannya.

Pejabat pengelola anggaran di SMA Negeri 4 Sukabumi lebih memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk memperoleh haknya yang menyangkut keterbukaan dalam proses penganggaran. *Stakeholder* diberi peluang untuk menghadiri (*right to attend*), memantau (*right to observe*) atau bahkan memberikan masukan (*right to express*) dalam proses perencanaan, pembahasan atau pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, atau proses pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sekolah.

Daftar Pustaka

Abdullah & Arisanti.H. 2010. "Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 2 Agustus 2010.

Ardianto, Elvinaro. 2010. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*. Bandung: Simbosa Rekatama Media.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Boy, Denny & Siringoringo, Hotniar. 2009. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid". *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 12 Vol. 14, Agustus 2009.

Colquitt, J.A., LePine, J.A., dan Wesson, M.J. 2009. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace*. New York: Mc Graww-Hill.

Djaali, dan Muljono, Pudji. 2008. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Erwantosi.2010 , " Analisis efektivitas ,Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di kota Padang". *Thesis*. 2010.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*, cetakan ke-7. Semarang :BadanPenerbit Universitas Diponegoro.

Hasan, M. Iqbal. 2005. *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif) Edisi 2*. Jakarta. Bumi Aksara.

Kande, Fredik. *Artikel Pendidikan Akuntabilitas dalam Manajemen Berbasis Sekolah*.19 Juni 2008.

Kusmaryani, R.E. 2007. "Membudayakan Nilai-nilai Komitmen Terhadap Pekerjaan Dalam Upaya Menegakkan Etika Profesi".*Dinamika Pendidikan* No. 1/ Th. XIV / Mei 2007.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mulyasa, E. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Cetakan ke-14. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nordiawan, Dedi, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurkolis, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori Model dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Purwanto, Erwan. A., dan Sulistyastuti, Dyah. R. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rachmat. 2011. *Akuntansi Pemerintahan, cetakan ke 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Riduwan. 2004. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan, Akdon. 2013. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Cetakan ke-4 Bandung: Alfabeta.
- Ristya Dwi Anggraini. 2013. "Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya". Surabaya.
- Robbins, Stephen. P. & Judge, Timothy. A. 2007. *Organizational Behavior*. Penerjemah: Diana Angelica. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochaety, Tresnaty, Majdid, E. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi Ke-4*, Buku Ke-1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-14. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, Purwanto. 2009. *Statistika 2, Edisi Ke-2*, Buku Ke-2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhardan, Riduwan dan enas. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, cetakan ke 1*. Bandung :Alfabeta.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Husaini., dan Akbar, Purnomo. S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara
- Uyanto, Stanislaus. S. 2006. *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Perundang-undangan:
 -----, Undang-Undang Dasar 1945.
 -----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 -----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 -----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 -----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.